

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi sering sekali terjadi pada negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi selalu disebut sebagai sebuah proses peningkatan output dari masa ke masa untuk menjadi sebuah indikator penting guna mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang juga memiliki masalah stabilitas ekonomi. Permasalahan ekonomi yang selalu terjadi di Indonesia adalah kemiskinan, sehingga fokus masalah yang dihadapi Indonesia adalah pengentasan kemiskinan. Adanya permasalahan ekonomi tersebut, kini pemerintah banyak mengeluarkan berbagai program dalam hal pengentasan kemiskinan, dengan harapan agar kemiskinan di Indonesia dapat diminimalisir.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah dengan adanya kebijakan berupa bantuan sosial untuk mengurangi populasi kemiskinan, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan fasilitas pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan di daerah. Pemberdayaan masyarakat juga sangat efektif dalam mencegah munculnya masalah-masalah lain yang disebabkan oleh kemiskinan, seperti gizi buruk, kriminalitas, anak jalanan, dan kondisi pemukiman yang buruk.

Masalah kemiskinan ini telah mengguncang pemerintah dan berbagai pihak institusi internasional untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai

Program, namun nyatanya beberapa program cenderung tidak berkelanjutan. Salah satu program nasional yang keberlangsungan hidupnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya ekonomi mikro adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah salah satu mekanisme rencana pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di pedesaan. Program PNPM-MPd ini diluncurkan pada 30 April 2007 oleh Presiden RI Ke-5 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM-MPd. Keberadaan lembaga UPK memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka melestarikan hasil-hasil yang telah dilaksanakan oleh program PNPM-MPd karena fokus kegiatan UPK dilakukan di tingkat kecamatan. Salah satu cara kerja dari program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM-MPd dalam lingkup kegiatan berdasarkan prinsipnya antara lain meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Salah satu program unggulan UPK adalah program dana bergulir berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Pinjaman yang diberikan oleh UPK melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan pinjaman tanpa syarat agunan dengan suku bunga yang rendah. Adanya keringanan dalam

peminjaman dana yang diberikan oleh UPK tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengelola modal yang telah diberikan secara mandiri sehingga nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Perusahaan dalam melakukan kegiatan perdagangan ataupun jasa tidak menutup kemungkinan timbulnya piutang. Budi (2011:3) “Piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus kegiatan perusahaan.” Sebagaimana dalam pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) salah satu masalah dalam program ini adalah piutang yang susah atau bahkan tidak bisa ditagih. Begitupula yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Berdasarkan data yang penulis peroleh langsung dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, perkembangan jumlah piutang macet Simpan Pinjam Perempuan (SPP) selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2018, 2019, dan 2020 terus mengalami kenaikan, sehingga pengelolaan dan pengendalian piutang yang baik sangat diperlukan guna untuk meminimalisir piutang macet di UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Pengendalian Piutang Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”.

B. Permasalahan

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mengalami kenaikan piutang macet. Dibuktikan dengan data perkembangan total piutang dan piutang macet yang diperoleh langsung dari UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Tahun 2018, 2019, 2020. Pada tahun 2018 total piutang sebesar Rp. 2.093.499.450 dengan total piutang macet sebesar Rp. 740.693.450 dan presentase piutang macet adalah 35,38%. Sedangkan pada tahun 2019 total piutang menjadi sebesar Rp. 2.051.467.450 dengan total piutang macet sebesar Rp. 880.048.550 dan presentase piutang macet adalah 42,89%. Dan pada tahun 2020 total piutang menjadi sebesar Rp. 1.924.724.450 dengan total piutang macet sebesar Rp. 885.216.450 dan presentase piutang macet adalah 45,99%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa presentase piutang macet Unit Pengelola Kegiatan bagian Simpan Pinjam Perempuan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dari tahun 2018 s/d 2020 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya menyebabkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengalami defisit atau aset yang dimiliki UPK menurun dan jumlah piutang macet pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bertambah. Sehingga dibutuhkan pengelolaan dan pengendalian piutang yang baik guna mengurangi jumlah piutang yang susah atau bahkan tidak bisa tertagih tersebut.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan piutang dan pengendalian piutang yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan piutang dan pengendalian piutang yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai gambaran dan sumbangan pemikiran atau saran bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam pengelolaan piutang dan pengendalian piutang sehingga dapat meminimalkan resiko piutang yang tak tertagih.

2. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan untuk penelitian sejenis.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan piutang dan pengendalian piutang.